

Berita Bohong dan Kredibilitas Media

Berita bohong kini menjadi persoalan yang membuat kredibilitas media serta dunia jurnalistik terpuruk. Sebagian orang meragukan berita-berita yang berseliweran karena tidak ada jaminan kebenaran dari berita itu. Di sisi lain, peran sebagai pengecek atau pengonfirmasi fakta belum banyak dialami media massa arus utama.

Rini Kustiasih

***Kompas Daily Newspaper*, 16 September 2017**

Problem berita bohong dan masa depan jurnalistik itu menjadi tema utama di dalam Asian Journalism Forum yang diselenggarakan Temasek Foundation bekerja sama dengan Institute of Policy Studies (IPS) dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, pertengahan Agustus lalu di Singapura. Forum itu bagian dari program pendidikan dan pelatihan yang diadakan Temasek Foundation untuk jurnalis Asia, yakni Asian Journalism Fellowship (AJF).

Dalam acara dua hari bertema "Reporting Facts and the Future of Journalism" itu, semua pembahasan bermuara pada berita bohong yang gelombangnya datang hampir bersamaan dengan mencuatnya fenomena populisme.

Cherian George dari departemen jurnalisme Universitas Hong Kong Baptist, setidaknya mengemukakan empat kebohongan paling top yang kerap disuarakan, yakni merokok itu tidak merugikan kesehatan, perubahan iklim tidak terjadi, propaganda kebencian (Islamophobia), dan keberadaan senjata pemusnah massal di Irak. Mereka yang menyebarkan disinformasi itu memiliki berbagai alasan, antara lain bisnis dan korporasi, politik dan kekuasaan, hingga jualbeli senjata dalam perang.

"Hal yang membuat berita bohong menjadi berbahaya karena ia meruntuhkan premis utama dalam jurnalistik, yakni akal sehat. Jika akal sehat tidak memenangi pertarungan ini (melawan berita bohong), apakah kita (jurnalis) harus menyerah?" tanya George.

Sejumlah pihak, menurut George, telah melakukan perlawanan terhadap berita bohong, tetapi beberapa di antaranya mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat karena mengancam kebebasan pers.

Baru-baru ini misalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melabeli CNN dengan media bohong karena beritanya mengenai adanya memo rahasia yang dikirimkan Rusia kepada AS sehingga seolah-olah Rusia memeras AS.

Berita itu belakangan diketahui palsu atau hoaks dan dijadikan propaganda anti-Trump. Sebagai responsnya, Trump mengecam CNN sebagai produsen berita bohong.

Namun, disinformasi tidak hanya karena kesalahan media. Pada kesempatan berbeda, Trump dikritik karena mengutip data yang tidak valid. Ia, misalnya, salah mengutip data yang mengatakan 27 persen Muslim adalah militan.

"Sayangnya, pernyataan keliru dari narasumber telanjur dikutip dan menjadi berita utama. Alih-alih menyampaikan suatu kebenaran dan mengkritisi pernyataan narasumber, media justru mengutip data keliru itu, sehingga seolah hal itu benar," urai George lagi.

Dimanfaatkan

Masalah berita bohong menjadi kian runyam jika berafiliasi dengan kepentingan politik. Bangkitnya populisme dan ultranasionalisme di sejumlah negara memicu perdebatan serius tentang bahaya berita bohong.

Shyam Tekwani dari Daniel K Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies mencontohkan propaganda politik Perdana Menteri India Narendra Modi yang membawa slogan, "I'm patriotic. I'm nationalist. I'm born Hindu." Pernyataan itu dibarengi dengan slogan lain yang mendiskreditkan agama tertentu serta berbagai informasi keliru yang bisa dikategorikan sebagai berita bohong.

Kasus di Indonesia juga disinggung oleh Eric Wishart, mantan editor Agence France-Presse (AFP). Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, menjadi gambaran bagaimana berita bohong membelokkan fakta dan berusaha memengaruhi preferensi pemilih.

Di Tanah Air, saat ini berita bohong ditengarai menjadi industri. Polri pada 23 Agustus lalu mengungkap keberadaan kelompok Saracen yang menyebarkan konten hoaks di ribuan akun grup Facebook yang mereka kelola, terutama Saracen News, Saracen Cyber Team, dan Saracennewscom.

Kepala Subdirektorat I Tindak Pidana Siber Bareskrim Komisaris Besar Irwan Anwar mencontohkan, sekitar 2,000 akun fokus memojokkan Islam, lalu ada sekitar 2,000 akun yang mendiskreditkan agama Nasrani, dan puluhan ribu akun lain terbagi lagi untuk konten hoaks yang mengarah ke pemerintah, tokoh politik, dan topik yang sedang hangat di publik (*Kompas*, 24/8).

Verifikasi

Yvonne Chua dari VERA Files Filipina setahun terakhir melakukan praktik mengonfirmasi fakta atau mengecek pernyataan tokoh atau politisi di Filipina. Prosesnya seperti kerja jurnalis pada umumnya, yakni menyimak perkataan tokoh dari suatu acara, konferensi pers, dan mencatat hal penting, serta menandai jika ada pernyataan yang "mencurigakan atau meragukan."

Pernyataan yang meragukan itu dicek kebenarannya dengan verifikasi dan klarifikasi kepada sumbernya atau melalui saluran resmi lainnya. Setelah berita bisa dipastikan benar atau palsu, tim pengonfirmasi fakta menuliskannya ke dalam laporan. Pernyataan mencurigakan itu disimpan sebagai data, yang suatu saat bisa dijadikan bahan perbandingan pernyataan tokoh itu selanjutnya.

Dengan berbagai variasi tertentu dan tidak melulu soal politik, sebagian media di Tanah Air sudah ada yang membuat rubrik khusus serupa pengonfirmasi fakta.

Kekuatan sebagai pengonfirmasi fakta ini menjadi nilai tawar media massa arus utama. Disiplin verifikasi dan akurasi adalah prinsip jurnalistik yang menjadikan media massa tetap kredibel dan dipilih publik.

Seperti kata Yvonne, "memasuki era di mana banyak sekali beredar fakta alternatif, jurnalis justru harus tetap berpegang teguh pada prinsip jurnalistik, yakni disiplin ketat pada verifikasi dan pengecekan fakta."